

Strategi Penguatan Kelembagaan melalui Kerja Sama *Triple Helix* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang

Martien Herna Susanti¹, Antari Ayuning Arsi², Anandha³

¹Program Studi Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang

²Program Studi Sosiologi dan Antropologi,
Universitas Negeri Semarang

³Program Studi Studi Manajemen Perusahaan,
Universitas Semarang

martien@mail.unnes.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.15294/sspi.v2i.624>

QRCBN 62-6861-7296-790

ABSTRAK

Kemitraan yang dijalin oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Negeri Semarang (Unnes) dapat diilustrasikan sebagai model *triple helix* yang melibatkan perguruan tinggi, sektor industri dan pemerintah. Masalah penelitian adalah strategi apa yang diperlukan untuk memperkuat kolaborasi *triple helix* di FISIP Unnes. Metode penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif deskriptif. Kegiatan pengumpulan data meliputi penelitian *desk research*, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa peningkatan kolaborasi merupakan kebutuhan strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memperkuat institusi di era PTN-BH. Penelitian ini menyoroti signifikansi model *triple helix* yang melibatkan universitas, sektor industri dan pemerintah dalam menciptakan ekosistem pendidikan dan inovasi. Masih digunakannya paradigma lama yang menempatkan masing-masing aktor dalam ruang kelembagaan tersendiri menyebabkan belum optimalnya manfaat model *triple helix* dalam praktik di lapangan. Idealnya setiap aktor memiliki keunggulan komparatif yang

saling melengkapi, sehingga mampu menyelesaikan persoalan melalui pendekatan ilmiah dan inovatif di antara ketiga pihak. Kesimpulan, hingga kini baik perguruan tinggi, sektor industri dan pemerintah perlu memperkuat sinergi dapat meningkatkan mutu pendidikan dan penguatan lembaga secara berkelanjutan, termasuk memperluas kemitraan global, serta melaksanakan kolaborasi yang nyata dan terukur untuk memberikan manfaat signifikan dalam penguatan institusi, kurikulum, daya serap alumni dan inovasi pendidikan.

Kata Kunci: strategi, kerjasama, *triple helix*.

PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas pendidikan di institusi perguruan tinggi merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera dilakukan. Hal ini beranjang dari peran dan kedudukan perguruan tinggi sebagai lembaga penting dan strategis yang menitikberatkan pada pengembangan nasional di bidang ekonomi serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Dengan memperkuat peran dan pengembangan di sektor pendidikan ini, dapat terwujud Sumber Daya Manusia sebagai pelaku pembangunan yang memiliki pengetahuan yang mendalam serta keterampilan yang tinggi. Oey-Gardiner et al. (2017) menyebutkan, idealnya perguruan tinggi mampu menghasilkan lulusan yang tangguh, berintegritas, adaptif dan kompeten sehingga mampu beradaptasi pada perubahan lingkungan (Binangkit, 2018).

Black, J. A. dan Champion, D. J (1999), menjelaskan terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan proses pengajaran khususnya di perguruan tinggi yang meliputi Sumber Daya Manusia yang terbatas, minimnya fasilitas dan infrastruktur lembaga yang disebabkan belum adanya komitmen dari pemerintah dalam perbaikan pendidikan, minimnya pemahaman masyarakat mengenai pendidikan, budaya komunitas yang bertentangan dengan budaya pengajaran, dan lain-lain (Sugiyanti et al., 2013).

Strategi peningkatan kualitas dilakukan dengan merubah salah satu subsistem seperti: individu, struktur, teknologi dan proses organisasi. Strategi yang diterapkan perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas lulusan, mencakup: (1) mahasiswa sebagai individu yang penerima pendidikan; (2) dosen dengan peran sebagai pengajar; serta (3) adanya fasilitas dan infrastruktur (Junaidah, 2019).

Pada 20 Oktober 2022, Universitas Negeri Semarang secara resmi berubah status dari PTN-BLU (Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum) menjadi PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum) melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. PTN-BH adalah institusi pendidikan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah sebagai lembaga hukum yang mandiri. Dengan kata lain, perguruan tinggi tersebut memiliki lebih banyak otonomi dalam mengelola semua peraturan baik yang berhubungan dengan akademik maupun non akademik. Dengan status itu, perguruan tinggi memiliki kebebasan untuk mengelola aset dan keuangannya. Keuntungan lainnya adalah kebijakan Dana Abadi Perguruan Tinggi yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek pada 26 Juli 2022 lalu serta diberikan kebebasan dalam membuka atau menutup prodi-prodi di dalamnya (Prastiwi, 2022).

Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum tersebut di atas, maka Unnes memiliki visi baru yaitu menjadi Universitas Bereputasi Dunia dan Pelopor Kecemerlangan Pendidikan yang Berwawasan Konservasi. Selanjutnya, pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 mengenai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum memiliki tujuan berikut: (1) menyelenggarakan pendidikan berkualitas tinggi dan memiliki reputasi internasional; (2) melaksanakan penelitian dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi; (3) melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah, memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (4) menerapkan tata kelola yang baik serta mampu beradaptasi dan bersinergi dengan lingkungan secara berkelanjutan; dan (5)

melaksanakan kolaborasi dan membangun reputasi (Kemensegneg, 2022).

Arah dan kebijakan PTN-BH meliputi: kerjasama, bisnis dan hubungan internasional. Peran kerjasama adalah sebagai *gate*. Artinya semua kegiatan bermula dari kegiatan kerjasama. Dalam rangka mencapai universitas berkelas dunia, pelopor kecermerlangan pendidikan yang berwawasan konservasi terdapat tiga indikator kinerja dalam bidang kerjasama yaitu: (1) pemeringkatan internasional, yaitu dapat masuk dalam QS Rank 100 dunia; (2) Pemeringkatan nasional, yaitu dalam mencapai IKU PTN-BH (IKU 6), yaitu program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia dalam kurikulum, magang dan penyerapan lulusan; dan (3) internal Universitas yaitu sesuai Renstra Unnes (Akademik, 2024).

Visi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik adalah menjadi fakultas bereputasi dunia dan pelopor kecermerlangan pendidikan ilmu-ilmu sosial yang berwawasan konservasi. Misi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik adalah: (1) menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu sosial yang cemerlang dan bereputasi dunia; (2) melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu-ilmu sosial dan pendidikan ilmu-ilmu sosial berbasis teknologi; (3) melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu-ilmu sosial dan pendidikan ilmu-ilmu sosial untuk memecahkan masalah, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat; (4) menerapkan tata kelola yang baik dan mampu beradaptasi dan bersinergi dengan lingkungan secara berkelanjutan; dan (5) melaksanakan kerja sama dalam membangun reputasi dunia (Akademik, 2024).

Berdasarkan visi, misi dan tujuan Unnes sebagai PTN BH, telah disusun strategi untuk mempercepat transformasi, baik dalam pengelolaan kelembagaan maupun program-program utama serta pelaksanaannya. Indikator prestasi reputasi global dinilai melalui jumlah program studi yang mendapatkan akreditasi internasional, pencapaian di skala internasional, kolaborasi dengan mitra internasional, serta sumbangan yang diberikan di tingkat global. Loncatan dalam pelaksanaan pelopor keunggulan pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya untuk mencapai reputasi internasional. Unnes memiliki keunikan dalam sistem

pendidikan dan pengajaran yang diterapkan. Penerapan wawasan konservasi untuk mahasiswa dilakukan melalui pendidikan karakter agar mereka dapat merealisasikan nilai-nilai Pancasila serta mampu beradaptasi secara global, berpikir kritis, inovatif dan berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah kompleks (Unnes, 2023)

Semakin kompeksnya permasalahan saat ini menuntut peningkatan mutu proses pembelajaran agar perguruan tinggi dapat kreatif mengembangkan ide-ide pembelajaran yang baru dan lebih menyeluruh sekaligus kompetitif untuk mengatasi permasalahan serta persaingan di era global. Salah satunya adalah meningkatkan daya serap lulusan yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Internal dilakukan melalui perbaikan proses pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran (*student-centered learning*). Tidak kalah pentingnya adalah pembelajaran yang mampu meningkatkan semangat *entrepreneurship*, pengembangan *softskill*, sehingga lulusan memiliki kepercayaan diri, berwawasan luas, memiliki kebijaksanaan mengenai nilai-nilai sosial budaya, mandiri, serta memiliki jiwa kepemimpinan.

Kehadiran kurikulum secara holistik menjadi hal yang sangat penting, karena pendidikan tinggi tidak hanya mengedepankan peningkatan kapasitas dan kecerdasan intelektual (IQ), tetapi juga kecerdasan emosional (EQ) dan spiritual (SQ) dalam proporsi yang seimbang. Hamalik Oemar (2007) menyatakan, bahwa kurikulum holistik perlu dirancang kontekstual untuk menciptakan keunikan tanpa mengurangi penekanan pada keilmuan atau kompetensi dasar di bidang masing-masing (Sugiyanti et al., 2013).

Kurikulum tidak lagi cukup disusun oleh Prodi atau perguruan tinggi, namun juga berdasarkan masukan dari *stakeholders* (mitra) dan alumni. Saat ini FISIP memiliki mitra kerjasama baik dalam maupun luar negeri yang terdiri atas perguruan tinggi, instansi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perusahaan dan UMKM yang sesuai dengan profil Prodi di lingkungan FISIP. Dalam praktiknya mitra pengguna produk bidang pendidikan di luar perguruan tinggi masih belum optimal jika dibandingkan dengan potensi peluang yang ada. Untuk mengoptimalkan mitra kerjasama,

khususnya mitra dalam negeri, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengevaluasi kegiatan kerjasama atau kemitraan yang dibangun selama ini. Dengan diketahuinya hal-hal tersebut, dapat disusun strategi yang berorientasi pada *link and match* sehingga mitra akan tertarik untuk melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam hal ini adalah FISIP Unnes.

Menurut Kadiman (2005), diperlukan komitmen dan kerja nyata dari tiga sektor yang disebut triple helix, yaitu A (*academician/akademisi*), B (*businessman/pengusaha*), dan G (*government/pemerintah*) (Murniati, 2009). Untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran, perguruan tinggi harus kreatif mengembangkan ide pembelajaran baru yang lebih menyeluruh sekaligus kompetitif. Penelitian lain yang dilakukan oleh Yuzhuo Cai (2014) mengkaji kolaborasi ketiga pihak di berbagai negara dalam mencapai pembangunan sosial ekonomi berbasis pengetahuan yang disebut *triple helix*, yaitu interaksi antara universitas, sektor industri dan pemerintah.

Selanjutnya, Etzkowitz & Leydesdorff menyatakan bahwa *triple helix* adalah tempat di mana akademisi memiliki akses ke sumber daya, pengetahuan dan perhatian terhadap teknologi guna menciptakan berbagai inovasi dan penemuan yang relevan (Huda, 2020). Para ilmuwan dengan sumber daya, pengetahuan dan teknologi yang dimiliki bertujuan untuk menciptakan berbagai penemuan dan inovasi yang dapat diterapkan. Kelompok bisnis melakukan investasi yang memberikan keuntungan finansial dan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah memastikan dan menjaga kestabilan hubungan di antara keduanya melalui regulasi yang mendukung. Perlunya mengembangkan model *triple helix* didasarkan asumsi, bahwa sektor industri, universitas dan pemerintah saling bergantung satu sama lain (Jaelani, 2020).

Soo Jeung Lee dan Thanh Ha Ngo (2012) menekankan, bahwa model *triple helix* berfokus pada pemanfaatan serta penggunaan pengetahuan di mana sebelumnya kebijakan pemerintah hanya difokuskan pada peran penciptaan serta produksi pengetahuan. Dalam praktiknya peningkatan jumlah produksi pengetahuan tidak selalu sejalan dengan perkembangan pengetahuan yang berkualitas dan berguna

(Firdaus, n.d.).

Pada masa pemerintahan yang lalu, bentuk kolaborasi antara perguruan tinggi dan mitra industri serta masyarakat ditetapkan melalui ekosistem Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sebagai langkah untuk mengatasi berbagai isu sosial, tantangan di dunia industri dan masyarakat, serta masalah di perguruan tinggi melalui kemitraan dengan dunia industri dan masyarakat (Franco & Pinho, 2019). Hal ini disebabkan oleh minimnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan sektor industri di Indonesia.

Perkembangan ilmu dan teknologi di perguruan tinggi diperkirakan masih kurang terarah pada pemenuhan kebutuhan atau penyelesaian masalah di Dunia Usaha, Dunia Industri (DUDIS) serta masyarakat. Keterkaitan dan keselarasan antara institusi pendidikan tinggi dan dunia usaha masih minim. Berbagai kegiatan Kampus Merdeka yang berlangsung di luar lingkungan pendidikan, seperti magang/praktik di bidang industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian masyarakat di desa, mengajar di lembaga pendidikan, terlibat dalam program pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, menjalankan kegiatan kewirausahaan, mengerjakan studi/proyek mandiri dan berpartisipasi dalam program kemanusiaan perlu didukung oleh kolaborasi yang kuat antara semua pemangku kepentingan, termasuk kampus, industri, pemerintah dan lembaga mitra guna membangun ekosistem Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pemerintah memahami pentingnya memberikan keuntungan bagi semua pihak yang ingin berpartisipasi aktif dalam pengembangan ekosistem Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta memperkuat hubungan antara pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi dengan sektor industri (Franco & Pinho, 2019).

Permasalahan penelitian adalah: bagaimana strategi yang diperlukan untuk memperkuat kerja sama *triple helix* lembaga di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang? Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan strategi yang diperlukan untuk memperkuat kerja sama *triple helix* lembaga di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang. Urgensi penelitian adalah memperkuat kolaborasi *triple helix* di FISIP Unnes,

sebagai upaya mendukung penguatan kelembagaan fakultas di tengah tuntutan peningkatan kinerja, otonomi dan daya saing perguruan tinggi. Artikel ini akan menjelaskan interpretasi kerja sama *triple helix* sebagai strategi kebijakan dalam memperkuat kelembagaan fakultas, bukan hanya sekadar kegiatan kolaboratif sebagai *novelty* penelitian.

METODE

Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif eksploratif. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penguatan kelembagaan melalui kerja sama *triple helix* FISIP Unnes. Pendekatan yang diterapkan mengacu pada kerangka penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Proses pengumpulan informasi meliputi *desk research*, wawancara dan analisis dokumen. Penelitian *desk research* dilakukan dengan mencari informasi yang ada di publik, baik melalui *website* maupun laporan kerjasama yang terdokumentasi di sistem kerjasama. Metode pengumpulan data terakhir adalah analisis dokumen, yang bertujuan untuk memperkuat reliabilitas penelitian melalui triangulasi sumber (Yin, 2013).

PEMBAHASAN

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Negeri Semarang telah menjalin beragam bentuk kolaborasi dengan mitra eksternal yang meliputi: elemen akademik, pemerintahan dan sektor bisnis/industri. Kerja sama tersebut melibatkan instansi pemerintah pusat dan daerah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dalam dan luar negeri, perusahaan, serta pelaku UMKM. Model kerja sama masih didominasi pelaksanaan kegiatan tridarma perguruan tinggi, terutama pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, seperti: magang mahasiswa, praktik kerja lapangan, kuliah tamu, penelitian bersama dan program Kampus Merdeka.

Berdasarkan studi yang dilakukan, diketahui bahwa kolaborasi *triple helix* di FISIP belum sepenuhnya dikelola secara strategis dan terintegrasi dalam upaya penguatan kelembagaan fakultas. Sebagian besar kolaborasi masih bersifat administratif, bersifat jangka pendek dan fokus pada

pemenuhan indikator kinerja tertentu, seperti pelaksanaan MBKM atau pencapaian IKU, belum diarahkan sebagai alat kebijakan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan. Keadaan ini sejalan dengan hasil penelitian Black dan Champion (1999) serta Sugiyanti et al. (2013) yang menekankan, bahwa keterbatasan sumber daya dan lemahnya sistem dukungan kelembagaan menjadi penghalang utama dalam perbaikan kualitas pendidikan tinggi.

Sebagaimana diketahui model *triple helix* yang menekankan kolaborasi antara universitas, industri dan pemerintah adalah model global untuk pengembangan masyarakat berbasis pengetahuan melalui inovasi dan kewirausahaan. Model ini berlandaskan pada praktik inovatif *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) yang bekerja sama dengan industri dan pemerintah untuk mengembangkan strategi pembaruan wilayah di *New England* pada awal abad ke-20. Pengalaman serupa juga terlihat di *Silicon Valley*, di mana Universitas Stanford berkolaborasi dengan industri dan pemerintah (Etzkowitz, 2018).

Kerja Sama *triple helix* dalam konteks kebijakan PTN-BH Peralihan status Universitas Negeri Semarang menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) membawa implikasi signifikan terhadap tata kelola dan pengembangan kerja sama. Dalam kerangka PTN-BH, kerja sama diposisikan sebagai *gate* atau pintu masuk utama dalam pencapaian visi universitas bereputasi dunia, pelopor kecemerlangan pendidikan dan berwawasan konservasi. Tiga indikator kinerja utama di bidang kerja sama pemeringkatan internasional, pencapaian IKU PTN-BH dan kesesuaian dengan Renstra UNNES menjadi acuan bagi seluruh fakultas, termasuk FISIP.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa FISIP telah berupaya menyelaraskan kebijakan kerja sama dengan arah strategis universitas, meskipun kerja sama *triple helix* belum sepenuhnya difungsikan sebagai mekanisme untuk mendukung penguatan kurikulum holistik, peningkatan daya serap lulusan dan pengembangan inovasi berbasis kebutuhan mitra. Idealnya dalam perspektif *triple helix*, sinergi antara akademisi, pemerintah dan dunia usaha merupakan prasyarat utama bagi pengembangan pendidikan tinggi yang relevan

dengan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi berbasis pengetahuan (Etzkowitz & Leydesdorff; Cai, 2014).

Implikasi kerja sama *triple helix* memiliki potensi strategis dalam memperkuat kelembagaan FISIP, khususnya dalam tiga aspek utama, yaitu: *pertama*, pada aspek akademik, kerja sama dengan mitra pemerintah dan industri dapat memperkaya kurikulum melalui pendekatan kontekstual dan berbasis kebutuhan nyata, sehingga mendukung pengembangan kurikulum holistik yang tidak hanya menekankan kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional dan spiritual sebagaimana dikemukakan oleh Hamalik (2007).

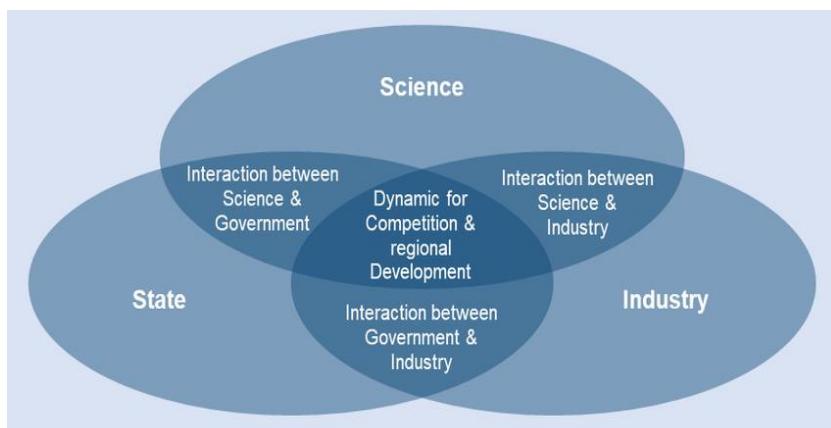
Kedua, pada aspek tata kelola kelembagaan, kerja sama *triple helix* berpotensi memperkuat sistem manajemen fakultas melalui pembagian peran yang jelas, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta penguatan jaringan kelembagaan. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat desain kebijakan yang secara eksplisit mengaitkan kerja sama *triple helix* dengan agenda penguatan kelembagaan fakultas, sehingga kerja sama cenderung berjalan parsial dan belum optimal.

Ketiga, pada aspek reputasi dan daya saing, kerja sama dengan mitra strategis, baik nasional maupun internasional, merupakan faktor penting dalam meningkatkan rekognisi institusi. Akan tetapi, keterbatasan integrasi antara kerja sama, inovasi dan kebijakan kelembagaan menyebabkan kontribusi kerja sama terhadap peningkatan reputasi fakultas belum maksimal. Hal ini menguatkan argumen Jaelani (2020), bahwa keberhasilan model *triple helix* sangat ditentukan oleh tingkat ketergantungan dan sinergi yang nyata antar aktor.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, strategi penguatan kerja sama *triple helix* di FISIP UNNES perlu diarahkan sebagai kebijakan kelembagaan, bukan sekadar aktivitas kolaboratif. Strategi tersebut mencakup: (1) integrasi kerja sama *triple helix* ke dalam perencanaan strategis fakultas; (2) penguatan peran fakultas sebagai koordinator dan *broker* kemitraan; serta (3) pengembangan kerja sama yang berorientasi pada *link and match* antara kurikulum, kebutuhan mitra dan penguatan daya serap

lulusan. Dengan demikian, kerja sama *triple helix* dapat menjadi instrumen kebijakan yang efektif dalam mendukung penguatan kelembagaan FISIP di era PTN-BH, sekaligus menjawab tantangan peningkatan mutu pendidikan, otonomi institusi dan daya saing perguruan tinggi di tingkat nasional maupun global.

Kemitraan model *triple helix* yang meliputi universitas, industri dan pemerintah dideskripsikan Gambar 1. berikut ini.



Gambar 1. Model *Triple Helix* (Hecklau et al., 2010)

Model *triple helix* melibatkan tiga aktor kunci, yaitu perguruan tinggi, pemerintah dan industri. Perguruan tinggi mengalami perubahan peran dari sekedar lembaga pendidikan menjadi institusi dengan fungsi pengajaran dan penelitian yang lebih beragam dan berfokus pada praktik. Pemerintah berfungsi sebagai pendorong, sekaligus penunjang dan penyedia dana untuk riset, sedangkan industri menghasilkan kebutuhan penelitian dan secara mandiri mengembangkan riset serta pengembangan. Interaksi antara ketiga aktor ini menciptakan dinamika sistem inovasi nasional yang dapat dianalisis secara menyeluruh menggunakan kerangka *triple helix*.

Dalam rangka mengimplementasikan penguatan kemitraan dengan DUDIS, FISIP Unnes telah menjalin kerja sama dengan berbagai mitra, baik dari dalam maupun luar negeri. Data penelitian menunjukkan bahwa kemitraan yang dibangun tidak hanya terbatas pada sesama perguruan tinggi,

tetapi juga mencakup institusi pemerintah, lembaga non-pemerintah, *start-up*, rumah sakit, serta sektor industri. Kemitraan dengan perguruan tinggi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi tetap menjadi fondasi utama, namun kemitraan dengan dunia industri semakin berperan sebagai barometer kualitas perguruan tinggi dalam berinovasi, khususnya dalam kemampuan menerjemahkan teori akademik menjadi teknologi tepat guna yang dapat diimplementasikan dan dikembangkan secara luas di masyarakat.

Dalam perspektif teori *triple helix*, Etzkowitz dan Leydesdorff menegaskan bahwa inovasi lahir dari interaksi dinamis antara universitas, industri dan pemerintah yang membentuk ruang pengetahuan (*knowledge space*), ruang konsensus (*consensus space*) dan ruang inovasi (*innovation space*). Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menyusun agenda dan rencana strategis penelitian, namun efektivitas peran tersebut sangat bergantung pada terbangunnya sinergi yang kuat dengan dunia industri dan dukungan regulatif dari pemerintah. Tanpa kolaborasi yang berkelanjutan, perguruan tinggi berisiko terus dipersepsikan sebagai *menara gading* yang birokratis dan kurang responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat dan industri.

Temuan penelitian menunjukkan, masih adanya kesenjangan pemahaman antarpelaku *triple helix*. Sebagian sivitas akademika belum sepenuhnya memahami permasalahan riil yang dihadapi industri, sementara di sisi lain industri sering kali belum mampu merumuskan dan mengomunikasikan kebutuhan serta tantangan yang dihadapi secara sistematis. Kondisi ini menghambat terbentuknya *consensus space* yang menjadi prasyarat utama kolaborasi inovatif sebagaimana dikemukakan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff.

Paradigma lama yang menempatkan masing-masing aktor dalam ruang kelembagaan tersendiri juga belum sepenuhnya direspon secara optimal oleh pemerintah, terutama terkait pemahaman atas peran dan karakteristik spesifik setiap sektor. Padahal, dalam model *triple helix*, setiap aktor memiliki keunggulan komparatif yang saling melengkapi. Perguruan tinggi, misalnya, lebih unggul dalam

menyelesaikan persoalan kompleks dan tidak terstruktur melalui pendekatan ilmiah dan inovatif, sehingga lebih tepat diposisikan sebagai mitra strategis industri, bukan sekadar pelaksana teknis. Selama industri belum memahami peran ini, perguruan tinggi tidak memperoleh ruang yang memadai untuk menunjukkan kapasitas inovatifnya.

Di sisi lain, selama ini sivitas akademika belum sepenuhnya memahami kompleksitas kebutuhan industri dan dinamika pasar serta menghargai logika kerja sektor tersebut, sehingga kolaborasi produktif akan sulit terwujud. Minimnya komitmen jangka panjang dari industri, baik dalam investasi riset dan pengembangan maupun keberlanjutan kemitraan, turut memperlemah terbentuknya *innovation space*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah, perguruan tinggi dan industri masih cenderung beroperasi dalam ruang kelembagaannya masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kebijakan yang kuat dan kerja kolaboratif untuk membangun ruang pengetahuan, ruang konsensus dan ruang inovasi secara simultan sebagai fondasi penguatan kerja sama *triple helix* yang berkelanjutan (Etzkowitz & Leydesdorff).

PENUTUP

Penguatan kolaborasi di FISIP Unnes adalah keperluan strategis untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, penguatan institusi, serta pencapaian visi universitas berstandar internasional di era PTN-BH. Penelitian ini menekankan bahwa kemitraan yang berhasil dapat dipahami melalui model *triple helix* yang melibatkan interaksi antara universitas, sektor industri dan pemerintah sebagai tiga aktor utama dalam pengembangan ekosistem inovasi dan pendidikan. Temuan penelitian mengindikasikan, bahwa pemerintah, universitas dan sektor industri masih lebih memilih untuk beroperasi dalam batasan kelembagaannya masing-masing. Keadaan ini menghalangi pembentukan ruang pengetahuan (*knowledge space*), ruang kesepakatan (*consensus space*) dan ruang inovasi (*innovation space*) secara maksimal. Oleh sebab itu, dibutuhkan komitmen yang kokoh, konsistensi dalam kebijakan, serta kolaborasi yang

berkelanjutan untuk menyelaraskan kepentingan dan ciri-ciri masing-masing sektor. Selain itu, penguatan kolaborasi tidak hanya perlu diarahkan ke dunia industri domestik, tetapi juga diperluas ke tingkat global dan internasional untuk meningkatkan daya saing, pengakuan, serta relevansi institusi. Selanjutnya, pelaksanaan kolaborasi harus difokuskan pada langkah-langkah nyata dan dapat diukur, agar kesepakatan kerjasama tidak terbatas pada aspek administratif, tetapi benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi penguatan institusi, pengembangan kurikulum, peningkatan penyerapan lulusan, serta inovasi pendidikan di FISIP Unnes.

DAFTAR PUSTAKA

- Akademik, P. (2024). *Renstra Unnes 2024*.
- Binangkit, I. D. (2018). *Studi Kasus Pada Lembaga Pendidikan Tinggi Muhammadiyah*.
- Etzkowitz, H. and C. Z. (2018). *The Triple Helix University-Industry-Government Innovation and Entrepreneurship Second Edition*. Routledge.
- Firdaus, R. M. (n.d.). *Implementasi Triple Helix Of Economic Education Terintegrasi Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Konteks Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. 71–77.
- Franco, M., & Pinho, C. (2019). A case study about cooperation between University Research Centres: Knowledge transfer perspective. *Suma de Negocios*, 4 (1), 62–69. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2018.03.003>
- Hecklau, F., Kidschun, F., Kohl, P. H., & Tominaj, S. (2010). *Analyzing the Role of Research and Technology Organizations (RTOs) in National Innovation Systems (NIS) 2 . Triple Helix Model*. Brockhoff.
- Huda, S. dan N. (2020). *Manajemen Pendidikan Di Indonesia Sebagai Implementasi Triple Helix Untuk Mempersiapkan Revolusi Industri 4.0*. 3, 74–79.
- Jaelani, A. (2020). *2 Triple Helix Sebagai Model Bagi Inovasi Pendidikan Tinggi – a 1–19*. <https://doi.org/10.24235/amwal.v11i1.4980>
- Junaidah, S. M. A. (2019). *Strategi Kerjasama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Dalam Meningkatkan*

Akreditasi Prodi. 9.

- Kemensegneg. (2022). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang* (Issue 148088). file:///C:/Users/DELL/Downloads/PP Nomor 36 Tahun 2022 (1).pdf
- Murniati, D. E. (2009). *Peran Pendidikan Kejuruan dalam Pengembangan Industri Kreatif.* November, 1–6.
- Prastiwi, M. (2022, October). Universitas Negeri Semarang Resmi Jadi PTNBH, Ini Visinya Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Universitas Negeri Semarang Resmi Jadi PTNBH, Ini Visinya”, Klik untuk baca:
<https://www.kompas.com/edu/read/2022/10/26/15000671/universitas-ne>. *Kompas.Com.*
<https://www.kompas.com/edu/read/2022/10/26/15000671/universitas-negeri-semarang-resmi-jadi-ptnbh-ini-visinya>
- Sugiyanti, D., Nurhadi, D., Jurusan, D., Teknik, P., & Universitas, M. (2013). *Implementasi Program Kerjasama.* 1, 63–77.
- Unnes. (2023). *Renstra Unnes 2023-202.*
- Yin, R. K. (2013). *Studi kasus desain dan metode.* Rajawali Pers.